

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh

**DIAN FIRDAUS
NPM. 1331040105**

Jurusan: Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH STUDI KASUS
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**Oleh
Dian Firdaus**

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dari aparaturnya merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Hal ini merupakan manifestasi dari aparaturnya selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat yakni masih ada beberapa atau sebagian yang masih belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Dengan tidak meratanya kepemilikan surat izin mendirikan bangunan terhadap masyarakat luas khususnya di Kabupaten Lampung Utara, maka pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dalam Wilayah Kabupaten Lampung utara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Berapa besaran peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 tahun 2015 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara?; 2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan ?

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukan bahwa terjadi kenaikan terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, tetapi tidak dengan pendapatan. sebab pendapatan yang diterima sejak diberlakukannya kebijakan tersebut mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan bahwa biaya terhadap masyarakat yang mengikuti pemutihan dipangkas hingga 50 % jika telah memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya. Faktor pendukung yakni memiliki tenaga manusia yang berpendidikan, struktur organisasi yang baik dan pembagian pekerjaan yang merata serta ditunjang dengan peralatan yang cukup memadai. Sedangkan Faktor yang menghambat adalah minimnya pembiayaan untuk menyelenggarakan sebuah kebijakan, Akses jalan yang jauh dan terdapat kerusakan jalan diberbagai titik dibagian pedalaman Kabupaten Lampung utara serta transportasi umum yang kurang memadai bagi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat terealisasi kebijakan dengan baik.

Kesimpulan yang didapat bahwa perlu adanya penertiban kembali oleh pemerintah daerah setempat terhadap kepemilikan IMB guna menyamaratakan kepemilikan IMB agar dimiliki oleh semua masyarakat yang memiliki rumah tempat tinggal, dan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari penertiban tersebut.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Firdaus

NPM : 1331040105

Prodi : Pemikiran Politik Islam (PPI)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, **“Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar karya asli dari penulis, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan di dalamnya.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini, maka saya bersedia bertanggung jawab dan menerima segala sanksi.

Bandar Lampung, 13 Juni 2020

Penulis



Dian Firdaus
1331040105



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

**Judul skripsi : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus
Kabupaten Lampung Utara)**

Nama : Dian Firdaus
NPM : 1331040105
Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Telah diperiksa dan dikoreksi oleh pembimbing I dan pembimbing II,
maka untuk itu pembimbing I dan Pembimbing II menyetujui untuk
dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 25 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
NIP: 197503172003121003

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP.19780130211012004

Mengetahui
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 19780130211012004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukrame Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lampung Utara) oleh Dian Firdaus, NPM :1331040105, Jurusan : Pemikiran Politik Islam (PPI) telah diujikan dalam siding munaqosah Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal :**

TIM PENGUJI

Ketuan Sidang : Dr. M. Afif Anshori, M.Ag.

Sekretaris : Gesit Yudha, M.I.P.

Penguji I : Drs. Agustamsyah, M.I.P.

Penguji II : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si.

Penguji III : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin

Dr. M. Afif Anshori, M.Ag
NIP. 196003131989031004

MOTO

AL-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat¹



¹ <https://tafsirweb.com/1590-quran-surat-an-nisa-ayat-58.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Ayahanda Akhmad (alm) dan Ibunda Muhaiyah tercinta
- Keluarga besar penulis
- Almamater tercinta
- Sahabat-sahabat dari Kotabumi terkhusus Angkatan 13
- Sahabat-sahabat Jurusan Pemikiran Politik Islam



RIWAYAT HIDUP

Dian Firdaus, dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 29 Desember 1994. Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara. Terlahir dari pasangan Bapak Akhmad (alm) dan Ibu Muhaiyah.

Pendidikan penulis dimulai di Taman Kanak-kanak pada TK kemala Bhayangkari Kotabumi dan selesai pada tahun 2002, dan dilanjutkan di SD N 4 Kota alam dan selesai pada tahun 2007, dan dilanjutkan kembali dengan pendidikan di SMP N 2 Kotabumi selesai pada tahun 2010, dan kembali dilanjutkan kembali di SMA N 4 Kotabumi selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2013/2014.

Selama masa kuliah penulis pernah tinggal dibeberapa tempat yang berbeda, diantaranya penulis pernah kos disalah satu kos-kosan di dekat MAN 1 Model, dan penulis pernah mengontrak rumah bersama teman-teman seperjuangan dari kampung halaman, dan akhir nya penulis tinggal di salah satu gedung di Islamic Center Provinsi Lampung di Rajabasa yakni gedung BKPRMI dan sekaligus gedung LPTQ sampai dengan saat ini.

Bandar lampung, 17 Juni 2020

Peneliti

Dian Firdaus

1331040105

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lampung Utara)”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat.

Karya skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Bapak Dr. M. Afif Anshori, M.Ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan sekaligus pembimbing II yang telah memberikan kesediaan waktu, saran dan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan kesediaan waktu, saran dan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
5. Kedua Orangtua (Bapak Akhmad (alm) dan Ibu Muhaiyah), kakak-kakak (Andri dan Nun), adik-adik (M.Aqillah dan Putri) dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
6. Sahabat-sahabat kelas B Jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2013.
7. Sahabat-sahabat Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
8. Sahabat-sahabat dari Kotabumi angkatan 2013.
9. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga jasa-jasa mereka mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Akhirnya, Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus kepada mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam.

Bandar Lampung, 17 Juni 2020
Penulis

Dian Firdaus
1331040105

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis Dan Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Metode Pengumpulan Data	11
4. Metode Analisis Data	12
H. Tinjauan Pustaka	13

BAB II ANALISIS, KEBIJAKAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Analisis	17
1. Pengertian Analisis	17
2. Macam-Macam Analisis	19
3. Hukum-Hukum Analisis	20
B. Kebijakan	20
1. Konsep Kebijakan	20

2. Jenis-Jenis Kebijakan	24
3. Lingkungan Kebijakan	26
C. Pendapatan Asli Daerah	29
D. Izin Mendirikan Bangunan	30
1. Pengertian Pajak Dan Retribusi Daerah	31
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	34

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Utara.....	37
1. Keadaan Geografis	37
2. Keadaan Demografis	40
B. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	41
1. Jenis-Jenis Perizinan	43
2. Mekanisme Dan Prosedur Pelayanan Perizinan	45

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara	49
1. Ketentuan Umum	49
2. Persyaratan	51
3. Prosedur	51
4. Pasal	52
5. Biaya Dan Jangka Waktu	52
6. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan	53
7. Ketentuan Penutup	53
B. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Terhadap Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.....	58
1. Faktor Pendukung	58
2. Faktor Penghambat	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah berjudul: **“Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lampung Utara)”**. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka kiranya perlu adanya diuraikan terlebih dahulu terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini, sehingga dengan adanya penegasan judul diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Analisis dapat diartikan sebagai aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya².

Kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi

² Drs.AG.Subarsono,M.Si,.M.A,*Analisis Kebijakan Publlik*,Pustaka Belajar,Bandung,2011.hal,3.

berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit³.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah⁴.

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar⁵.

Oprasinonal adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel, atau oprasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian.⁶

³ Ibid, Hal.4.

⁴ Ateb Adyaa Barata, Pendapatan Asli Daerah, Erlangga. Jakarta, 2004. hal.9.

⁵ <https://kbbi.web.id/upaya.html>

⁶ <https://www.google.com/amp/s/amp.kaskus.co.id/thread/57bcd3dc9a0951e61b8b456c/pengertian-operasional>

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya merintah yang sah.

Berdasarkan dari penegasan judul diatas penulis ingin menganalisis kebijakan pemerintah daerah khusus nya tentang kebijakan Perbub Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendorong penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif Ilmiah

Penelitian serupa mengenai Analisis kebijakan pemerintah daerah mungkin sudah banyak sekali dilakukan, akan tetapi masih sangat jarang atau bisa dikatakan langka terhadap penelitan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam hal ini penulis merujuk kepada Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 tahun 2015 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.

2. Alasan Subyektif Ilmiah

Judul yang diangkat ada relevansinya dengan perkembangan mata kuliah Pemikiran Politik Islam yang ada pada Jurusan Pemikiran Politik Islam dan lokasinya mudah terjangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan tersebut dikelompokkan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, di mana pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital atau modal maupun sumber daya berupa teknologi, dengan tujuan akhir adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pembangunan yang adil dan merata di segala aspek kehidupan, baik di pusat maupun di daerah. Pembangunan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana Pembangunan dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.⁷

Pengelolaan pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk menopang laju pembangunan di daerah dan membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan PAD Kabupaten Lampung Utara. Dalam pelaksanaantugas

⁷Barata, Atep Adya, *Pendapatan Asli Daerah*. Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 59

pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Sumber utama pendapatan daerah, khususnya di Daerah Kabupaten Lampung Utara adalah Pajak. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang dalam hal ini disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pencapaian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat memerlukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai untuk melaksanakan pemerintahan di daerah. Pajak daerah yang dapat digunakan untuk menambah PAD khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah pajak restoran. Dalam hal ini dapat dilihat Perkembangan target dan realisasi PAD dua tahun terakhir yang berasal dari Pajak Daerah. Besarnya pendapatan daerah didalam struktur APBD Kabupaten Lampung Utara masih diandalkan sebagai penggerak mesin perekonomian yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Kondisi ini jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Utara. Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah maka pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Lampung Utara.

Salah satu kebijakan Kabupaten Lampung Utara terkait dengan peningkatan PAD adalah peningkatan penerimaan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan serta IMB berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 tahun 2015 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara, hal ini dilakukan karena selama ini Pajak Bumi dan IMB merupakan pajak daerah yang memberikan salah satu kontribusi cukup besar dalam peningkatan PAD. Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan berbagai urusan rumah tangga daerah adalah pembiayaan. Mengingat kebutuhan dana yang diperlukan untuk tahun-tahun anggaran berikutnya semakin besar guna membiayai APBD, maka pemerintah daerah setempat serta dinas terkait harus mampu menghimpun dana serta menggali potensi yang ada secara maksimal. Adapun masalah yang terjadi di masyarakat adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai IMB walaupun bangunan yang mereka miliki sudah berdiri dan telah ditinggali.⁸

Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun,

⁸Hasil wawancara dengan Drs. Huzaini, MM selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017

mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.⁹

Sunarto menegaskan bahwasanya IMB merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan atau orang untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan (NLB) serta Ketinggian Bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, orang lain dan lingkungan.¹⁰

Disisi lain juga masih saja ada masyarakat yang tidak memiliki atau mendaftarkan bangunan mereka, baik itu bangunan baru atau lama. Oleh sebab itu dikeluarkannya Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 tahun 2015 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara, disamping memudahkan masyarakat untuk membuat dan mendaftarkan bangunan mereka sampai memiliki izin IMB juga berharap dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari Perbub yang dikeluarkan tersebut.

Penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut, karena IMB tidak semata-mata dimaksudkan untuk menjadi sumber penerimaan daerah saja, akan tetapi yang lebih penting dimaksudkan sebagai suatu cara pemerintah, untuk menata dan

⁹Marihot Pahala Siahaa, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 22

¹⁰Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm.

mengawasi penggunaan lahan yang ada, sehingga terjadi keselarasan dan kesesuaian dengan peruntukannya termasuk mempertimbangkan daya dukung lingkungannya.

Atas latar belakang kondisi diatas penulis mengambil judul: Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lampung Utara).

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah yang ada, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Berapa besaran peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 tahun 2015 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui besar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara sejak diberlakukannya kebijakan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 tahun 2015 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugas terhadap Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 tahun 2015 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dilakukan dengan cara memberi tambahan data empiris yang telah teruji ilmiah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan

atau pada responden.¹¹ Penelitian ini bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dari objek penelitian.¹² Secara sederhana dapat dikatakan deskriptif eksploratif riset yang mengklarifikasikan data yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan kondisi objek tentang upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder.

a. Sumber Data primer

Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, dalam hal ini yaitu data-data yang bersumber dari pihak atau institusi yang melakukan wawancara antara peneliti dengan narasumber agar memperoleh data mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan

¹¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1996), h. 102,

¹²*Ibid*, h. 105

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara.¹³ Wawancara akan dilakukan dengan Hj.Mega Rani,SE.MM selaku Kepala bidang pengawasan dan pengendalian data regulasi dan pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Utara, lalu dengan Drs. Huzaini, M.M. selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan dengan Berta,S.Ag selaku Kasi Perumahan Rakyat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta dari salah satu warga yang penulis temui di kantor (DPMPTSP) pada saat penulis berada disana ketika pengambilan data.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah Administrasi Pembangunan, Manajemen Pemerintahan, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang didapatkan dari perpustakaan yang ada di sekitar peneliti yang menjadi data skunder untuk penelitian ini, guna untuk memperoleh data mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Metode Observasi

¹³V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2014). h. 73.

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek. Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada pada objek yang diteliti.

b. Metode Wawancara(*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian, khususnya kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara.

c. Metode Dokumentasi

Data skunder (dokumentasi) adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian, khususnya kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Analisis data merupakan proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian/proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan.¹⁴

Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis, mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara

H. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, makalah, jurnal, tulisan bebas dan skripsi yang penulis lakukan.

- a. Skripsi yang berjudul “STRATEGI KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MERAUKE. Karya Yacobus Duwiri, Penelitian ini bertujuan mengetahui

¹⁴ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm 159.

(1) Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (OTODA) di Indonesia lebih khususnya di Kabupaten Merauke (2) Strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Merauke.(3) Keadaan tersebut memberikan gambaran, bahwa pelaksanaan pembangunan selama ini di Kabupaten Merauke sangat tergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat, hal ini dapat dilihat pada kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Merauke. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif menggambarkan sesuai dengan data berdasarkan variable penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (OTODA) di Indonesia, telah melalui rentang waktu yang cukup panjang, namun belum menunjukkan hasil mengembirakan. Pola hubungan pusat dan daerah dikelola secara sentralistik melalui semua lini dan hampir semua urusan pemerintahan dikendalikan secara langsung oleh pemerintah pusat.Sumber daya ekonomi juga sentralistik dari Jakarta, baik melalui mekanisme sektor publik (keuangan pemerintahan) maupun melalui mekanisme swasta.

- b. Skripsi yang berjudul “UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM” karya Wisnu Pramono Singgih. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan

undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan bahan non hukum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pelaksanaan retribusi pasar pada kurun waktu dua tahun terakhir berjalan kurang memuaskan. Yakni penerimaan pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp.2.830.841.300,00 dari retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 2.857.772.110,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp. 26.930.810,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2014 jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 3.508.369.000,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan dari target adalah sebesar Rp. 3.327.201.100,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp. 181.167.900,00.

- c. Skripsi yang berjudul “STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN” Karya Parulian Simanjuntak. Hasil penelitian menunjukkan DOF Kabupaten Humbang Hasundutan masih menunjukkan kepada angka yang masih sangat kecil sehingga ketergantungan daerah tersebut pada pusat masih sangat tinggi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang akan dilakukan di daerah tersebut akan masih sangat tergantung pada dana-dana bantuan dari pemerintah provinsi dan Pusat. Kemampuan PAD Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memenuhi pembiayaan rutin juga

menunjukkan angka yang masih rendah. Dengan kata lain, PAD yang dihasilkan kabupaten tersebut belum mampu untuk memenuhi belanja rutin daerah tersebut. Pada 2 tahun terakhir efektivitas administrasi penerimaan PAD menunjukkan hal yang mengkhawatirkan karena angkanya yang menurun menjadi cukup efektif karena nilainya hanya berkisar antara 60 – 80% saja. Walaupun pada awalnya menunjukkan angka yang sangat efektif

- d. Skripsi dengan judul “ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN UPAYA PENINGKATANNYA DI KABUPATEN BANYUMAS” Karya Hendri Panggayuh, hasil penelitian menunjukkan Beberapa usulan yang ditujukan untuk pemerintah kabupaten untuk meningkatkan PAD, diantaranya: Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dari sektor andalan, Adanya keseimbangan insentif & disinsentif untuk menjamin kepatuhan, Mengoptimalkan peran legislative, Meningkatkan Efisiensi pelayanan publik, Kendalikan KKN dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi, Meningkatkan jaminan keadilan bagi wajib pajak/retribusi, Adanya pembedaan kebijakan pajak (*tax*) & retribusi (*service charge*) secara jelas, dan Meningkatkan kemampuan administrasi: pendataan, analisis potensi, penetapan, penagihan, keberatan & dispensasi, pengawasan, penegakan hukum.

Sedangkan pada penelitian ini yang akan menjadi pokok bahasan adalah ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus

Kabupaten Lampung Utara) yang berbeda dengan keempat penelitian sebelumnya baik dalam penggunaan maupun subjek penelitian yang diambil.



BAB II

ANALISIS, KEBIJAKAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Analisis

1. Pengertian Analisis

Untuk mengetahui apa itu sesungguhnya analisa kita akan berangkat melalui pengertian. Analisis berasal dari kata analisa. Penggunaan kata ini memiliki arti kata yang berbeda tergantung dimana anda meletakkan kata ini. Dalam konteks bahasa analisa berarti memeriksa secara menyeluruh tentang struktur bahasa tersebut. Dalam laboratorium dapat diartikan dengan meneliti zat dalam penelitian.

Apa yang dimaksud dengan analisis (*analysis*)? **Pengertian Analisis** adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan. Kata analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu

pengetahuan, baik itu pengetahuan sosial, manajemen, ekonomi bisnis, akuntansi, ilmu bahasa, pengetahuan alam, dan bidang ilmu lainnya.¹⁵

Namun definisi umum dari **analisis adalah** kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah-milih untuk dapat dimasukan ke dalam kelompok tertentu atau dikategorikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Hingga akhirnya harus mencari kaitan antara hal-hal tersebut dan menterjemahkan arti tersebut.

Menurut beberapa ahli, terdapat beberapa pengertian tentang analisis yaitu :

a. Minto Rahayu

Analisis merupakan sebuah proses dari sebuah kinerjayang mempunyai urutan tahapan pekerjaan sebelum dilakukannya riset dan di dokumentasikan dalam penulisan laporan¹⁶.

b. Robert J. Schreiter

Analisis diumpamakan sebagai “membaca” sebuah teks. Proses ini akan menyambungkan berbagai tanda dan menempatkan tanda tersebut dalam proses komunikasi yang dinamis. Tanda tersebut dapat dilihat melalui pesan yang disampaikan melalui proses¹⁷.

¹⁵ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>. diakses pada tanggal 8 februari 2019.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1996.hlm.23

¹⁷ Ibid.hlm.25

c. Husein Umar

Analisis adalah sebuah proses pekerjaan yang urutan dan tahapan dari pekerjaan sebelum hasil dari sebuah riset didokumentasikan dalam sebuah laporan.¹⁸

2. Macam – macam Jenis Analisis

a. Analisis Logika

Analisis logika adalah pemecahbelahan sesuatu ke bagian-bagian yang membentuk keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. Pemecah belahan ini menjelaskan keseluruhan atau himpunan yang membentuk term sehingga mudah dibeda-bedakan. Analisis logik dibedakan atas dua macam, analisis universal dan analisis dikotomi.¹⁹

- 1) Analisis universal merupakan pemerincian atau penguraian suatu genus dibagi ke dalam semua spesiesnya, atau juga dirumuskan pemecah-belahan term umum ke term-term khusus yang menyusunnya. Analisis universal untuk hal-hal yang kompleks susunannya, analisis universal mungkin tidak tepat, bahkan untuk hal-hal yang tidak dapat semua diketahui, analisis universal tidak dapat diterapkan karena mungkin ada sesuatu bagiannya yang belum dapat diketahui.
- 2) Analisis dikotomi merupakan pemecah-belahan sesuatu dibedakan menjadi dua kelompok yang saling terpisah, yang satu merupakan term

¹⁸ <https://jagad.id/pengertian-analisis-macam-jenis-fungsi-tujuan-dan-contohnya/>

¹⁹ <https://othersidemiku.wordpress.com/2013/01/24/logika-analisis-definisi/>

positif dan yang lain term negatif. Analisis dikotomi ini didasarkan atas hukum logika “prinsip eksklusi tertii”, yakni prinsip penyesihan jalan tengah. Analisis dikotomi harus menentukan suatu diferensia yang dipilih berbentuk term positif dan kebalikannya membentuk term negatif. Contoh analisis sebagaimana berlaku di Indonesia tentang pembagian ilmu yang pada umumnya dibedakan atas dua macam, yaitu ilmu dibedakan atas eksakta dan non eksakta. Term eksakta adalah term positif dan term non eksakta adalah term negatif.²⁰

3) Analisis realis

Analisis realis yaitu pemecah-belahan berdasarkan atas susunan benda yang merupakan kesatuan atau atas dasar sifat perwujudan bendanya. Analisis realis dibedakan menjadi dua macam, analisis esensial dan analisis aksidental.

(1) Analisis esensial merupakan pemecah-belahan sesuatu hal ke unsur dasar yang menyusunnya.

(2) Analisis aksidental merupakan pemecah-belahan sesuatu hal berdasarkan sifat-sifat yang menyertai perwujudannya²¹.

B. Kebijakan

²⁰ Ibid

²¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2014). h. 89.

1. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian [konsep](#) dan asas yang menjadi [pedoman](#) dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada [pemerintahan](#), [organisasi](#) dan kelompok sektor swasta, serta [individu](#). Kebijakan berbeda dengan [peraturan](#) dan [hukum](#). Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu [perilaku](#) (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran [pajak penghasilan](#)), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau [kajian kebijakan](#) dapat pula merujuk pada proses pembuatan [keputusan-keputusan](#) penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit²².

Secara konseptual ada beragam pengertian yang diberikan para ahli tentang kebijakan. Namun secara umum “kebijakan” dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan²³.

²² Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta. 2011. hlm. 68

²³ H.M. Hasbullah, *kebijakan Pendidikan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015. Hlm. 56

Menurut Eulau dan prewitt yang dikutip oleh Jones (1995), bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya Jones menganalisis komponen-komponen pengertian kebijakan yang terdiri dari :

- a. Goal, atau tujuan yang diinginkan
- b. Plan atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan
- c. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan
- d. Decision, ialah tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan, dan menilai rencana
- e. Effect, yaitu akibat-akibat dari rencana (disengaja atau tidak, primer atau sekunder, diperhitungkan sebelumnya atau tidak, diestimasi sebelumnya atau tidak)²⁴.

Solichin Abdul Wahab (1990), menjelaskan mengenai ragam penggunaan istilah kebijakan yaitu : (1) merek bagi suatu bidang tertentu, (2) pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki, (3) usulan khusus, (4) keputusan pemerintah, (5) bentuk pengesahan formal, (6) program, (7) keluaran, (8) hasil akhir, (9) teori atau model, (10) proses.

Thomas R. Dye (1998), mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai “ is whatever governments choose to do or not to do”. Dikemukakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada

²⁴ Ibid.hlm.59

tujuannya, dan kebijakan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pemerintah semata²⁵.

Nugroho (2003: 7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Syafiie (2006:104) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta jadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah²⁶.

Kenyataan-kenyataan tersebut diatas membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan negara, diantaranya :

1. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengara pada tujuan daripada sebagai prilaku atau tindakan yang serba acak atau kebetulan.

Kkebijakan negara dalam sistem sistem politik modern pada umumnya

²⁵ Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta. 2011. hlm.88

²⁶ <http://www.edugovindonesia.com/web/index.php/2-uncategorised/27-pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>

bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan, tetapi merupakan tindakan yang direncanakan terlebih dahulu.

2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dan bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan, ekonomi, perumahan rakyat, pengentasan kemiskinan dan sebagainya
4. Kebijakan negara mungkin berbentuk positif mungkin juga negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi masalah tertentu. Sedangkan yang dalam bentuk negatif kemungkinan meliputi keputusan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak , atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana sangat diperlukannya campur tangan pemerintah.²⁷

2. Jenis-jenis Kebijakan

Disamping kita mengenal berbagai tingkatan kebijakan, pada dasarnya kebijakan juga dapat dibedakan dalam beberapa jenis, sesuai sasaran atau objek apa yang mendasari lahirnya sebuah kebijakan tersebut.

²⁷ H.M. Hasbullah, kebijakan Pendidikan, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, 2015. Hlm. 37

Secara tradisional, para pakar ilmuwan mengategorikan kebijakan publik ke dalam kategori: (1) kebijakan substansi (misalnya: kebijakan pendidikan, perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri, dan sebagainya), (2) kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen), dan (3) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa Reformasi, kebijakan masa Orde Baru, dan kebijakan masa Orde Lama).²⁸

Kategori lain tentang kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Anderson (1979), dimana dia membagi beberapa jenis kebijakan tersebut seperti sebagai berikut :

1. Substantive policies Yakni suatu kebijakan yang menyangkut materi, isi, atau subject matter kebijakan, misalnya kebijakan dibidang pendidikan, perdagangan, hukum, perburuhan, pertanian dan lain-lain.
2. Procedural policies Yaitu kebijakan yang menyangkut siapa, kelompok mana dan pihak mana yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.
3. Distributive policies Merupakan kebijakan yang memberikan pelayanan atau keuntungann kepada sejumlah atau sekelompok masyarakat
4. Redistributive policies Adalah kebijakan yang arahnya memindahkan hak, kepemilikan, kepunyaan pada masyarakat
5. Regulatory policies Merupakan kebijakan yang berkenaan dengan pembatasan atas tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang.

²⁸ Ibid hlm.52

6. Self regulatory policies Kebijakan jenis ini hampir sama dengan regulatory policies, hanya saja self regulatory policies lazimnya didukung oleh seseorang atau sekelompok orang yang punya kepentingan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
7. Material policies Merupakan kebijakan mengenai penyediaan sumber-sumber material kepada penerimanya, dengan mengenakan beban atau kerugian kepada yang mengalokasikannya.
8. Symbolic policies Kebijakan jenis ini umumnya tidak memaksa kepada banyak orang karna dilaksanakan tidaknya kebijakan tersebut tidak selalu besar dampaknya kepada masyarakat.
9. Collective good policies Adalah kebijakan tentang penyediaan barang dan pelayanan guna memenuhi kepentingan orang banyak. Pelayanan demikian, jika diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang. Misal, kebijakan wajib belajar 9 tahun.
10. Private good policies Adalah kebijakan penyediaan kebutuhan tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi masyarakat tersebut harus menyediakan biaya untuk mnedapatkan layanan.
11. Liberal policies Adalah suatu kebijakan yang menuntut kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubahan.
12. Conservative policies Kebijakan ini merupakan kebalikan dari kebijakan liberal..²⁹

²⁹ Drs. AG. Subarsono, *Analisis kebijakan Publik*, Gaba Media, Yogyakarta, 2009 hlm.102

3. Lingkungan Kebijakan

Pengertian lingkungan kebijakan yang lebih spesifik perlu dipahami dalam pemaknaan yang umum atau plural. Perencanaan merupakan proses atau tahapan yang paling penting dalam suatu fungsi manajemen, perencanaan juga dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemungkinan tujuan-tujuan organisasi diwaktu yang akan datang dengan melihat program-program yang akan dijalankan. Dalam membuat perencanaan harus bersifat fleksibel, dalam artian perencanaan tersebut bisa menyesuaikan terhadap lingkungan eksternal yang dinamis³⁰.

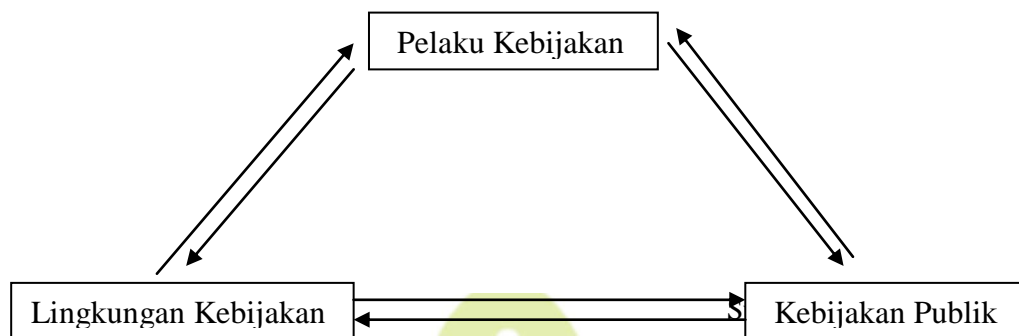
Dalam hal ini paling tidak harus dipahami kepada tiga kategori besar, yaitu (1) lingkungan umum diluar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik dan nilai-nilai tertentu. (2) lingkungan didalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia dan sebagainya. (3) lingkungan khusus yang memengaruhi kebijakan.

Lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas yang tinggi, krisis ekonomi, gejala politik yang ada pada suatu negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukannya kedalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan. Misalnya kebijakan pengembangan investasi yang dapat

³⁰ <https://www.kompasiana.com/ani74971/5c00060412ae945fea6cbcbd/lingkungan-kebijaksanaan-pendidikan-menjadikan-kebijakan-pendidikan-fleksibel>

menyerap tenaga kerja, kebijakan penegakan hukum untuk mengatasi kriminalitas, kebijakan pengurangan pajak untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan keamanan untuk mengatasi gejolak politik³¹.

Gambar berikut mendeskripsikan hubungan antara tiga elemen yang terlibat dalam sebuah kebijakan³² :



Dalam teori sistem dikemukakan bahwa pembuatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Kebijakan pasti akan dibentuk dan membentuk lingkungan sekitarnya (sosial, politik, ekonomi, maupun budaya), dimana pada suatu saat kebijakan menyalurkan masukannya pada lingkungan sekitarnya, namun pada saat yang sama atau yang lain, lingkungan sekitar membatasi atau memaksakannya pada perilaku yang harus dikerjakan oleh para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan kedalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan memengaruhi policy makers. Faktor lingkungan tersebut antara lain: karakteristik geografi, seperti sumber daya alam, iklim, dan topografi; Variabel demografi, seperti:

³¹ Drs. AG. Subarsono, *Analisis kebijakan Publik*, Gaba Media, Yogyakarta, 2009 hlm.102

³² Ibid. hlm.131

banyaknya penduduk, distribusi umur penduduk, lokasi spesial; kebudayaan politik; struktur sosial; dan sistem ekonomi. Dalam kasus tertentu lingkungan internasional dan kebijakan internasional menjadi penting untuk dipertimbangkan, karna ikut juga menentukan.

Pengertian kebijakan publik menurut Amara Raksasataya adalah sebuah rangkaian suatu tindakan yang saling berhubungan³³. Dalam konteks ini ada dua variabel makro yang memengaruhi kebijakan publik, yakni lingkungan domestik dan lingkungan internasional atau global dapat memberikan input yang berupa dukungan dan tuntutan terhadap sebuah sistem politik yang berlaku. Kemudian para aktor dalam sistem politik akan memperoses atau mengkonversi input tersebut menjadi output yang berwujud peraturan dan kebijakan.

Peraturan dan kebijakan tersebut akan diterima oleh masyarakat, selanjutnya masyarakat akan memberikan umpan balik dalam bentuk input baru kepada sistem politik tersebut. Apabila kebijakan tersebut memberikan insentif, maka masyarakat akan mendukungnya, sebaliknya apabila kebijakan tersebut bersifat disinsentif, misalnya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) atau pajak, maka masyarakat akan melakukan tuntutan baru, berupa tuntutan penurunan harga BBM dan penurunan pajak tersebut³⁴.

C. Pendapatan Asli Daerah

³³ William N Dunn, *Analisis kebijakan Publik*, PT. Hanindita Graha Widia, 2001. hlm. 35

³⁴ Drs. AG. Subarsono, *Analisis kebijakan Publik*, Gaba Media, Yogyakarta, 2009 hlm. 102

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah adalah: Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah³⁵. Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

D. Izin Mendirikan Bangunan

³⁵ Mardiasmo, Keuangan Negara dan Daerah (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 132.

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.³⁶

1. Pengertian Pajak dan Retribusi Daerah

a. Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah

³⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan

pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Prof.Dr.P.J.A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo (1991:2) yaitu : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Dalam definisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh: segi penghasilan dan segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

b. Retribusi Daerah

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai

hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karna pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan³⁷.

Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pasal 1 angka 26 undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).³⁸

Beberapa istilah yang terkait dengan retribusi daerah antara lain :

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

³⁷ Waluyo, perpajakan Indonesia edisi 10, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hlm. 21

³⁸ Ibid. Hlm. 35

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Prizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.³⁹

2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dipungut retribusi atas pelayanan izin mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah,

³⁹ Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,Ak. Perpajakan Edisi Revisi 2008, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.

memperluas, mengurangi dan/atau merobohkan, merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merobohkan, dan/atau merenovasi bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya dengan berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan gedung atau bangunan bukan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi kegiatan :

- a. peninjauan desain atau gambar ; dan
- b. pemantauan pelaksanaan pembangunan.

Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk sarana bangunan

gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung serta sarananya.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi IMB didasarkan pada jenis bangunan, yaitu :

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan bukan gedung;
- c. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan :
 1. Pembangunan baru;
 2. Rehabilitasi/renovasi; dan
 3. Pelestarian/pemugaran.
- d. Pembiayaan administrasi IMB, meliputi :
 1. Pemecahan dokumen IMB;
 2. Pembuatan duplikat/fotokopi dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak;
 3. Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung; dan/atau
 4. Perubahan nonteknis lainnya.
- e. Penyediaan formulir permohonan IMB;
- f. pembiayaan operasional jasa pelayanan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis

bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB; dan

- g. pembiayaan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.⁴⁰



⁴⁰ <http://keuangan.kendalkab.go.id/index.php/pendapatan/retribusi/13-retribusi-perijinan-tertentu/40-retribusi-izin-mendirikan-bangunan>

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Atep Adya Barata, *Pendapatan Asli Daerah*. Erlangga, Jakarta, 2004.
- Data yang diterima berupa fotokopi tentang Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 tahun 2015 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara.
- Elita, *Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*, Rajawali. Jakarta, 2007.
- H.M. Hasbullah, *kebijakan Pendidikan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Mardiasmo, *Optimalisasi Belanja Modal*. Erlangga, Jakarta, 2008.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakara, Bandung, 2008.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Drs. AG. Subarsono, *Analisis kebijakan Publik*, Gaba Media, Yogyakarta, 2009
- William N Dunn, *Analisis kebijakan Publik*, PT. Hanindita Graha Widia, 2001
- Winardo, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta, 2008
- Waluyo, *perpajakan Indonesia edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., Ak. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2008
- Ndrada, Taliziduhu, *Birokrasi Pembangunan, Dominasi atau Alat Demokratisasi*, Gramedia, Jakarta. 2000.
- Sianipar, J.PP., *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, LAN edisi ke-2 JKT. 1999.
- Sukirno, *Pertumbuhan Ekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- Sutopo, dkk, *Pelayanan Prima*, LAN, Jakarta. 2000.

Thohah, Miftah, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta. 2003.

Waluyo, *perpajakan Indonesia edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

B. Sumber Skripsi/Tesis

Endah Setiyorini, 2013. *SKRIPSI Analisis Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Dumai*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

C. Sumber Internet

<https://www.lampungutarakab.go.id/wp-content/uploads/201709statistik-2015-16.pdf>.

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>. diakses pada tanggal 8 februari 2019

<https://jagad.id/pengertian-analisis-macam-jenis-fungsi-tujuan-dan-contohnya/>

<https://www.lampungutarakab.go.id/wp-content/uploads/201709statistik-2015-16.pdf>.

<https://othersidemiku.wordpress.com/2013/01/24/logika-analisis-definisi/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan

<https://lampungutarakab.go.id>

<http://keuangan.kendalkab.go.id/index.php/pendapatan/retribusi/13-retribusi-perijinan-tertentu/40-retribusi-izin-mendirikan-bangunan>